

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) menetapkan bahwa wabah Virus *Covid-19* sebagai pandemi global (Dong et al., 2020). Pandemi yang tengah berlangsung ini memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan utang selama pandemi *Covid-19* terjadi di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju (CNBC, 2022). Pemerintah di berbagai negara terpaksa berutang untuk menambah biaya kesehatan serta biaya perlindungan sosial-ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat utang seluruh dunia mencapai US\$ 226 triliun. Berdasarkan data di situs *World Bank*, Afganistan dan Kamerun termasuk di antara 30 negara yang berisiko tinggi mengalami kesulitan utang luar negeri secara keseluruhan, sementara Grenada, Mozambik, Republik Kongo dan Somalia telah mengalami tekanan utang luar negeri (Fernando, 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia mengalami kenaikan rasio utang sebesar 41%, sementara pada saat pra-pandemi hanya sebesar 10,8%. Akibatnya Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan total pinjaman luar negeri terbesar versi Bank Dunia pada tahun 2019 dan 2020.

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Berdasarkan Berita Resmi Statistik 5 Februari 2021, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,19% pada Triwulan IV -2020 jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2019. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 terkontraksi sebesar 2,07% (Badan Pusat Statistik, 2021). Kontraksi tersebut membuat Indonesia kini berstatus sebagai negara berpendapatan menengah-bawah. Hal ini berarti Indonesia mengalami penurunan kelas, yang mana sebelumnya merupakan negara berpendapatan menengah-atas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Silfiana (2021) tentang Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa, menyatakan bahwa berbagai sektor ekonomi di Pulau Jawa mengalami perlambatan, bahkan terkontraksi cukup dalam. Kontraksi pertumbuhan perekonomian juga terjadi di Provinsi Jambi. Ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan IV-2020 jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2019 mengalami penurunan sebesar 0,99% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 juga menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Pemerintah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19. Akibatnya beberapa kegiatan sosial seperti bekerja dan belajar-mengajar dilakukan secara daring dari rumah. Selain itu, kebijakan PSBB juga turut memengaruhi kelancaran distribusi barang antar kota, antar provinsi, dan antarpulau. Akibatnya, beberapa produk mengalami kenaikan harga (inflasi). Kenaikan harga tersebut menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Para pelaku ekonomi mengalami berbagai kesulitan selama masa pandemi, tak terkecuali para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kendala yang dialami pelaku UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, penurunan pelanggan, distribusi dan produksi terhambat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet (Katadata.co.id, 2020). Sementara itu, hasil survei dari beberapa Lembaga seperti BPS, Bappenas, dan *World Bank* menunjukkan bahwa terdapat banyak UMKM yang kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan (Bahtiar, 2021). Bahkan beberapa di antaranya terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan.

Kebutuhan hidup dasar adalah upah atau pendapatan. Kenaikan harga yang terjadi perlu diimbangi dengan upah yang sesuai. Jika pendapatan tidak dapat menutupi kenaikan harga maka kualitas hidup dan daya beli akan menurun. Sehingga dapat menurunkan kesejahteraan pekerja atau bahkan mengarah pada peningkatan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional mengungkapkan persentase penduduk miskin di Indonesia naik dari 9,22% menjadi 10,7% atau mengalami kenaikan sebesar 0,97% pada September 2020 (*y-o-y*). Upah minimum juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018), upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Upah minimum regional juga dapat memengaruhi pendapatan per kapita Bank Dunia menyatakan bahwa pandemi yang berlangsung menyebabkan penurunan pendapatan per kapita hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pendapatan per kapita Indonesia turun dari US\$4.050 di tahun 2019 menjadi

US\$3.870 di tahun 2020 (Kemenkeu RI, 2021). Upah minimum regional juga dapat memengaruhi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat mengakibatkan merosotnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kementerian Keuangan melaporkan, pendapatan asli daerah hingga 31 Oktober 2020 merosot Rp 33,88 triliun atau 14,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Fauzia, 2020). Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi pada tahun 2020, pendapatan daerah Provinsi Jambi menurun seiring pemotongan dana perimbangan oleh pusat dan potensi penurunan PAD. Adapun target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2020 sejumlah Rp4,176 triliun atau berkurang Rp517,681 miliar dari target APBD murni Tahun 2020 sejumlah Rp4,693 triliun. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sejumlah Rp1,665 triliun pada APBD Murni Tahun 2020 menjadi Rp1,360 triliun atau berkurang Rp304,338 miliar. Penurunan PAD ini tentunya berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dalam sektor ekonomi. Adapun faktor yang diduga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian sebelumnya, yaitu; jumlah kasus positif *Covid-19*, fasilitas kesehatan yang menanggulangi kasus *Covid-19*, jumlah pelaku UMKM, pendapatan per kapita kabupaten/kota dan upah minimum kabupaten/kota.

Penurunan pertumbuhan ekonomi nasional mempengaruhi daerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut (Sebayang, 2015). Akibat ketimpangan ekonomi tersebut, daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah akan berusaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian di daerahnya. Kasus tersebut mengindikasikan hubungan antar wilayah, untuk itu analisis yang tepat digunakan yaitu analisis regresi spasial (Yasin dkk., 2020).

Analisis regresi spasial digunakan untuk melihat adanya efek lokasi/spasial antar wilayah yang diduga turut mempengaruhi variabel dependen. Pemodelan pada regresi spasial dilakukan dengan menambahkan matriks spasial/*contiguity* (W) yang diperoleh dari kedekatan lokasi antar wilayah objek pengamatan pada model regresi yang digunakan. Penambahan matriks W tersebut dapat dilakukan pada variabel-variabel dependen (parameter koefisien

regresinya akan disimbolkan dengan ρ). Jika efeknya hanya nyata terhadap parameter ρ maka model disebut model *Spatial Autoregressive Regression* (SAR).

Pemodelan pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi perlu memasukkan efek spasial ke dalamnya, karena dilihat bahwa karakteristik wilayah suatu daerah mempengaruhi daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, analisis regresi spasial dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian tentang “**Analisis Regresi Spasial Laju Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana model analisis regresi spasial yang terbentuk dari kasus pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19 di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh masing-masing faktor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana peta persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yang terbentuk dari hasil analisis regresi spasial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Memperoleh model analisis regresi spasial dari kasus pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19.
2. Mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
3. Mendapatkan peta persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi

1.4 Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, di antaranya :

1. Bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan matematika di bidang statistika yang berhubungan dengan regresi spasial.
2. Bagi pembaca adalah sebagai bahan informasi dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah adalah sebagai sumber informasi tentang penyebaran pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan batasan masalah, tujuannya agar materi dan pembahasan tidak meluas. Adapun batasan masalah yang ditetapkan, yaitu :

1. Objek yang menjadi perhatian pada penelitian ini yaitu 11 kabupaten /kota yang berada di Provinsi Jambi.
2. Data yang digunakan merupakan data tahun 2020.
3. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari indikator Produk Domestik regional bruto (PDRB) di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini di antaranya; jumlah kasus positif Covid-19, fasilitas Kesehatan yang menanggulangi kasus Covid-19, jumlah pelaku UMKM, upah minimum kabupaten/kota dan pendapatan per kapita kabupaten/kota.
4. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Spasial.
5. Proses analisis pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi piranti lunak *GeoDa* .